

PERAN PEMBIAYAAN KUR MIKRO DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN UMKM DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP MALANG TUREN 1

Esy Nur Aisyah¹ dan Lutfia Uswatul Maulida²

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[1esynuraisyah@pbs.uin-malang.ac.id](mailto:esynuraisyah@pbs.uin-malang.ac.id) [2lutfiauswatulmaulida@gmail.com](mailto:lutfiauswatulmaulida@gmail.com)

Tanggal Masuk :	Informasi artikel :	Tanggal diterima:
29 Agustus 2024	Tanggal Revisi : 9 September 2024	18 September 2024

Abstract

This study aims to analyze the effect of BSI KUR Mikro financing products in supporting the growth of MSMEs at Bank Syariah Indonesia KCP Malang Turen 1 after the Covid-19 pandemic. The method used is descriptive qualitative with data analysis from internal bank documents, interviews, and relevant literature. The study results indicate that BSI KUR Mikro Financing significantly contributes to the welfare of MSME actors. During the pandemic, this program is vital in maintaining MSME operations and increasing business stability amidst declining income. After the pandemic, MSMEs that received BSI KUR Mikro financing showed a significant increase in revenue growth, innovation, and market expansion compared to those that did not receive such funding. In addition, this financing also improved the quality of products and services. The success of this financing is supported by adequate financial management, supervision based on the 5C principle, and strict verification procedures. BSI KUR Mikro has proven to be a vital tool in supporting the growth and economic recovery of MSMEs in Indonesia.

Keywords: BSI KUR Mikro Financing, MSME Growth, Economic Recovery

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh produk pembiayaan BSI KUR Mikro dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Bank Syariah Indonesia KCP Malang Turen 1 pasca pandemi covid-19. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis data dari dokumen internal bank, wawancara, dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan BSI KUR Mikro memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM. Selama pandemi, program ini berperan penting dalam mempertahankan operasi UMKM dan meningkatkan stabilitas bisnis di tengah penurunan pendapatan. Setelah pandemi, UMKM yang mendapatkan pembiayaan BSI KUR Mikro menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam hal pertumbuhan pendapatan, inovasi, dan ekspansi pasar dibandingkan dengan UMKM yang tidak menerima pembiayaan tersebut. Selain itu, pembiayaan ini turut memperbaiki kualitas produk dan layanan. Keberhasilan pembiayaan ini didukung oleh pengelolaan keuangan yang efektif, pengawasan berbasis prinsip 5C, dan prosedur verifikasi yang ketat. Secara keseluruhan, BSI KUR Mikro terbukti menjadi alat yang vital dalam mendukung pertumbuhan dan pemulihan ekonomi UMKM di Indonesia.

Kata Kunci: Pembiayaan BSI KUR Mikro, Pertumbuhan UMKM, Pemulihan Ekonomi

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan, terutama perbankan, memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama melalui perbankan syariah. Namun, banyak usaha mikro dan kecil menghadapi kesulitan dalam memperoleh modal kerja yang diperlukan. Bank konvensional yang menggunakan sistem bunga sering kali kurang efektif dalam mendukung perkembangan usaha kecil karena tingginya beban pengembalian yang tidak sebanding dengan laba yang diperoleh pengusaha. Sebaliknya, Bank Syariah dengan mekanisme bagi hasilnya lebih mampu menyediakan modal kerja yang dibutuhkan oleh pengusaha kecil. Pada awal tahun 2020, pandemi Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, memberikan dampak negatif pada berbagai sektor bisnis, khususnya UMKM. Pandemi ini menghambat pertumbuhan UMKM secara signifikan. Kegiatan bisnis UMKM yang biasanya memerlukan ruang pameran dan promosi terhambat oleh kebijakan Physical Distancing dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan untuk mempercepat penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia. Setelah pandemi, kebutuhan akan dukungan keuangan yang efektif menjadi semakin mendesak bagi UMKM untuk pulih dan tumbuh kembali. Dalam

situasi ini, peran BSI melalui produk pembiayaan KUR Mikro menjadi sangat relevan. Program ini tidak hanya membantu UMKM bertahan selama masa krisis tetapi juga mendorong pertumbuhan mereka di masa pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

UMKM memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi makro, meskipun menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan modal kerja, rendahnya kualitas sumber daya manusia, produktivitas yang kurang optimal, serta kekurangan dalam aspek ilmu pengetahuan dan teknologi. mengungkapkan bahwa tantangan utama yang dihadapi UMKM di Indonesia mencakup keterbatasan modal kerja, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan kekurangan kemampuan dalam ilmu pengetahuan serta teknologi. Dua faktor utama yang menghambat akses UMKM terhadap pembiayaan adalah keterampilan manajerial yang rendah dan masalah permodalan. Bank Indonesia mengatur akses UMKM terhadap pembiayaan melalui Peraturan BI No. 14/22/2012, yang sejak tahun 2018 mewajibkan bank umum untuk menyalurkan setidaknya 20% dari total kredit mereka kepada UMKM.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 mendefinisikan UMKM berdasarkan aset dan omzet tahunan. UMKM berperan penting dalam penciptaan lapangan kerja, dengan jutaan orang dipekerjakan oleh sektor ini, menjadikannya pemberi kerja terbesar di Indonesia. UMKM juga membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dengan memberikan peluang bagi kelompok yang terpinggirkan seperti perempuan dan masyarakat pedesaan. Selain itu, UMKM berkontribusi terhadap kreativitas dan inovasi di Indonesia. Banyak UMKM yang bergerak di industri kreatif seperti teknologi informasi, fashion, kerajinan tangan, dan kuliner, yang membantu melestarikan warisan seni dan budaya Indonesia serta menciptakan nilai tambah. Namun, UMKM juga menghadapi kesulitan seperti akses pasar yang terbatas, akses pendanaan yang sulit, dan keterampilan manajemen yang kurang memadai. Untuk meningkatkan kapasitas UMKM, diperlukan dukungan dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, baik melalui pendanaan, pemasaran, pelatihan, maupun infrastruktur yang memadai.

Modal adalah komponen penting untuk meningkatkan output dan kinerja UMKM. Ketika menghadapi kesulitan keuangan, beberapa pemilik usaha kecil sering menghubungi rentenir yang mengenakan bunga tinggi, mengakibatkan jebakan utang. Bank syariah, yang beroperasi tanpa bunga, dapat menjadi alternatif yang lebih baik. Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan salah satu lembaga keuangan yang mendukung pengembangan UMKM melalui produk pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro. KUR Mikro bertujuan memenuhi kebutuhan modal kerja atau investasi bagi pengusaha mikro, dengan dukungan mekanisme penjaminan untuk usaha yang produktif dan menguntungkan.

Penelitian terdahulu menunjukkan pentingnya pembiayaan dalam mendukung UMKM. (1) menyatakan bahwa pembiayaan UMKM berpotensi menjadi mesin perekonomian bangsa, terutama ketika sistem pembiayaan yang efektif dapat mengatasi kekurangan modal internal yang dihadapi UMKM. (2) menyatakan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan menemukan bahwa program ini membantu UMKM dalam memperoleh pembiayaan dengan risiko kredit yang ditanggung sebagian oleh pemerintah, sehingga meningkatkan akses terhadap modal. (3) menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia memainkan peran kunci dalam mendukung UMKM selama pandemi Covid-19 dengan menyalurkan program KUR dan memberikan restrukturisasi untuk mengatasi dampak ekonomi, sambil menghadapi risiko seperti keterlambatan pembayaran angsuran akibat penurunan omzet usaha.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh produk pembiayaan BSI KUR Mikro dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Bank Syariah kcp Malang Turen 1 indonesia pasca pandemi covid-19. Secara spesifik, penelitian ini akan mengkaji bagaimana produk KUR Mikro syariah mendukung pertumbuhan UMKM, serta menilai efektivitas dan dampak pembiayaan ini terhadap peningkatan kinerja usaha mikro pasca pandemi covid-19.

Pembiayaan Syariah

Pembiayaan dapat didefinisikan sebagai pemberian dana kepada nasabah atau konsumen lembaga keuangan untuk membantu mengatasi kekurangan modal individu atau kolektif. Dalam hal ini, tanggung jawab utama lembaga keuangan atau perbankan adalah pendanaan. Teori stewardship menyatakan bahwa dengan menetapkan prioritas hasil berdasarkan kepentingan bersama, maka bank membantu dalam memenuhi kebutuhan penerima dana atau melakukan aktivitas pembiayaan tersebut untuk memenuhi permintaan pendanaan (Bella, 2022).

Menurut teori Stewardship menyatakan bahwa pembiayaan bank syariah dapat dipahami dengan konsep bank syariah sebagai principal yang mempercayakan dananya kepada steward atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai pelayan. Gagasan ini didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat pada dasarnya dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas kewajiban yang mereka ambil setelah kesepakatan tercapai. Penjelasan ini membawa kita pada kesimpulan bahwa pendanaan adalah sebuah proses yang dimulai dengan keyakinan dan kesepakatan; jika masih kurang akan diberikan jaminan. Dengan tujuan akhir demi kebaikan bersama, lembaga keuangan, dalam hal ini bank, memberikan pembiayaan untuk membantu klien memenuhi kekurangan modal atau keuangannya.

Secara umum, operasi pembiayaan syariah bank melibatkan pengambilan simpanan, tabungan, dan uang giro dari masyarakat umum, memberikannya kepada mereka dalam bentuk kredit atau pembiayaan, dan melakukan jasa keuangan lainnya. Perusahaan pembiayaan syariah, sering disebut pembiayaan dalam bahasa Inggris, beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip akad syariah dalam semua aspek operasi komersialnya. Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan kompensasi atau bagi hasil.”

Peraturan perundang-undangan tersebut menjadi landasan penerapan keuangan syariah di Indonesia dan mengatur fundamentalnya. Oleh karena itu, penerapan pembiayaan syariah dapat dilihat kaitannya dengan hukum keuangan syariah dari sudut pandang hukum Islam. Jika masyarakat saling percaya, maka mereka akan memiliki keyakinan terhadap penerapan pembiayaan syariah. Melalui pembiayaan, hutang dan piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan jangka pendek, komitmen, dan sertifikat wadiah kontinjen, kepercayaan ini akan menumbuhkan rasa keadilan, keamanan, dan kesejahteraan dalam kemitraan.

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sejenis pembiayaan atau pinjaman yang memberikan investasi atau uang operasional kepada debitur usaha atau organisasi yang menguntungkan dan sukses ketika mereka kekurangan agunan tambahan. Program pemerintah yang disebut Kredit Usaha Rakyat bertujuan untuk mendukung usaha kecil dan menengah. Inisiatif pemerintah yang disebut Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) memberikan akses lebih besar kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap pendanaan melalui lembaga keuangan yang mengikuti pola penjaminan.

Program KUR berupaya memberdayakan UMKM dan mempercepat pertumbuhan sektor riil melalui kebijakan yang meningkatkan kapasitas permodalan usaha. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pembangunan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM dikeluarkan pemerintah guna mewujudkan hal tersebut. Tanggal 5 November 2007 merupakan tanggal dimulainya program KUR. Dana bank atau lembaga keuangan lain yang menjadi penyalur KUR memberikan pendanaan kepada KUR. Dana ini diberikan kepada UMKM secara individu atau kelompok yang mempunyai usaha yang menguntungkan dan berkelanjutan namun tidak memiliki jaminan lebih lanjut atau layak tetapi tidak bankable. Bentuknya dana modal kerja dan dana investasi.

Menurut Gustika, Kredit Usaha Rakyat memberikan fasilitas modal operasional dan investasi yang didukung dengan fasilitas penjaminan bagi usaha yang sejahtera kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai kredit atau pembiayaan. Meskipun perbankan menyuplai seluruh pendanaan untuk KUR, pemerintah mensponsori inisiatif ini (5). Riawan dan Kusnawan mengemukakan bahwa “Salah satu sumber pendanaan untuk proses produksi yang dapat membantu UMKM adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat memfasilitasi bisnis, meningkatkan standar kredit dan lembaga keuangan lainnya, serta dapat mengurangi kemiskinan Indonesia dengan menyediakan modal dan menciptakan lapangan kerja” (6).

Jadi dari beberapa pendapat diatas mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat diambil kesimpulan yaitu program dimana ditujukan untuk para pelaku usaha dengan modal yang bersumber dari perbankan. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini tentu akan menunjang para pelaku UMKM dalam pengembangan usaha mereka dengan mengadaptasi metode dan alat yang ada saat ini sehingga dapat memberikan hasil yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha mereka. Dengan begitu para pelaku usaha dapat konsisten dalam memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan perjanjian program kredit yang mereka ambil.

Jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR) Jenis penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) adalah sebagai berikut:

- a) BSI KUR Kecil: Merupakan fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah guna memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafon mulai dari Rp. 50 Juta hingga Rp. 500 Juta.
- b) BSI KUR Mikro: Fasilitas pembiayaan ini diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan tujuan memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafon antara Rp. 10 Juta hingga Rp. 50 Juta.
- c) BSI KUR Super Mikro: Fasilitas pembiayaan ini khusus untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan plafon hingga Rp. 10 Juta, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi.

Tujuan program KUR adalah untuk meningkatkan penciptaan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan akses terhadap kredit dan lembaga keuangan, sekaligus memperkuat sektor primer” (Herrera Villanueva, 2020).

Menurut Kadju dan Bandesa tujuan pengembangan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) (8), yaitu:

- a) Mempercepat pemberdayaan UMKM dan Koperasi serta pertumbuhan sektor riil.
- b) Mengurangi hambatan kredit dan mendorong pertumbuhan UMKM, Koperasi, dan Bank.
- c) Dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan memperluas akses terhadap pekerjaan.

Jadi dapat diambil kesimpulan tujuan Kredit Usaha Rakyat yaitu dapat mengembangkan usaha bagi para pelaku UMKM untuk terus berinovasi dan menyesuaikan era kemajuan di dunia usaha. Tentu dengan adanya bantuan dana kepada para pelaku usaha akan sangat membantu dalam membangun usaha yang lebih kreatif terutama pada operasional usaha yaitu pelayanan dan kenyamanan tempat usaha.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah jenis usaha yang mandiri dan produktif, dilakukan oleh individu atau entitas bisnis di berbagai sektor ekonomi. Kategori usaha ini umumnya ditentukan berdasarkan nilai aset awal (kecuali tanah dan bangunan), omzet tahunan rata-rata, atau jumlah karyawan tetap. Namun, definisi UMKM dapat bervariasi antar negara berdasarkan metrik-metrik tersebut.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan usaha yang dimulai dengan modal awal yang relatif kecil, memiliki aset yang terbatas, serta jumlah tenaga kerja yang sedikit. Jumlah modal atau tenaga kerja yang dimiliki ditentukan berdasarkan definisi yang diberikan oleh otoritas publik atau instansi terkait dengan tujuan tertentu. Oleh karena itu, UMKM dapat disimpulkan sebagai usaha yang berada dalam skala kecil atau terbatas, baik dari segi modal maupun jumlah tenaganya. Meskipun begitu, UMKM terus berupaya untuk mempertahankan kepuasan pelanggan (9).

UMKM memainkan peran penting dalam berbagai aspek pertumbuhan ekonomi di suatu negara, sehingga mereka harus diberikan kesempatan, dukungan, perlindungan, dan peningkatan yang luas sebagai wujud komitmen terhadap ekonomi rakyat (Purnomo, Saputra, dan Simarmata, 2020). Perkembangan UMKM yang baik tidak terlepas dari peran pemilik usaha serta faktor-faktor pendukung yang memungkinkan UMKM tersebut untuk terus beroperasi (10).

Mampu menjalankan perekonomian secara mandiri, yang dibuktikan dengan kemampuan mereka dalam menjalankan usaha tanpa bantuan pihak luar dengan menggunakan modal dan teknologi sendiri, merupakan fungsi penting yang harus dijalankan oleh UMKM dalam kemajuan perekonomian, khususnya di Indonesia. harus mampu bersaing di pasar dengan pemilik usaha lainnya (11).

Perbankan Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang mendukung mekanisme ekonomi real estat dengan berinvestasi atau membeli dan menjual properti, serta menawarkan layanan tabungan perbankan kepada nasabahnya. Ketika ada hasil atau keuntungan, bank dan nasabah pendanaannya membagi margin keuntungan bank (12).

Definisi perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, yang mencakup berbagai elemen terkait bank syariah dan unit usaha syariah, termasuk struktur organisasi, kegiatan bisnis, serta prosedur operasional yang diterapkan. Bank syariah terdiri dari tiga kategori:

Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan seluruh kegiatan bisnisnya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (13).

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan operasinya berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam, dengan menekankan etika serta sistem yang bebas dari riba (bunga), menghindari spekulasi yang tidak produktif seperti perjudian (maysir), serta menjauhkan unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian (gharar). Bank syariah berlandaskan prinsip keadilan dan hanya mendukung pembiayaan untuk kegiatan usaha yang halal. Konsep bank tanpa bunga hanyalah salah satu bagian dari prinsip-prinsip bank syariah, di mana selain menghindari riba, bank ini juga berkontribusi dalam mencapai tujuan ekonomi Islam yang menekankan kesejahteraan sosial (14).

Dengan demikian, perbankan syariah diartikan sebagai bank yang merupakan lembaga keuangan negara yang menjalankan operasionalnya dengan tetap berpegang pada prinsip syariah tanpa mendikte atau membebani nasabahnya. Hal ini juga mengacu pada keuntungan atau imbalan yang diperoleh nasabah yang memanfaatkan kontrak atau perjanjian yang dibuat nasabah dengan bank berdasarkan persetujuan bersama kedua pihak. Syarat-syarat hukum Islam harus disebutkan dalam perjanjian (akad) (15).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif sebagai pendekatan utama, dengan sumber data yang diperoleh dari dokumen internal Bank Syariah Indonesia, wawancara langsung, serta berbagai referensi seperti buku, website BSI, dan literatur yang relevan. Pendekatan studi literatur digunakan untuk mendeskripsikan masalah yang dipilih, dengan teknik pengumpulan data yang meliputi studi kepustakaan dari buku digital, artikel, jurnal, dan penelitian terdahulu yang terkait.

Penelitian ini difokuskan pada analisis respons, tindakan, dan motivasi dari subjek penelitian terkait situasi yang dihadapinya, khususnya di Bank Syariah Indonesia KCP Malang Turen 1. Untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas data, metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Malang Turen 1, yaitu Addy Yuwanata (Operational Staff), Andhika (Micro Relationship Manager), dan Jaka Prasetio (Retail Sales Executive). Data yang diperoleh dianalisis secara mendetail dan disajikan dengan bahasa yang natural, menggunakan berbagai metode ilmiah untuk memastikan keakuratan hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dampak Pembiayaan BSI KUR Mikro Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Pelaku UMKM

Pembiayaan BSI KUR Mikro telah menunjukkan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM, terutama dimasa pandemi COVID-19. Banyak pelaku UMKM di Indonesia mengalami penurunan pendapatan dan menghadapi tantangan dalam menjaga operasional bisnis mereka selama pandemi. Menurut penelitian oleh (16), dukungan finansial yang diberikan melalui program KUR Mikro mampu meningkatkan daya tahan UMKM selama krisis ekonomi, dengan sebagian besar penerima pembiayaan melaporkan peningkatan stabilitas bisnis mereka. Hal ini menunjukkan bahwa program ini tidak hanya memberikan suntikan modal yang diperlukan tetapi juga menyediakan fondasi untuk kelangsungan bisnis di tengah ketidakpastian ekonomi.

Pasca pandemi COVID-19, produk pembiayaan BSI KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Malang Turen 1 berperan penting dalam membantu UMKM untuk berkembang. Banyak UMKM di daerah ini mengalami kesulitan untuk kembali menjalankan usahanya setelah krisis. Namun, UMKM mampu tumbuh dan sejahtera berkat pendanaan fleksibel dan syariah yang ditawarkan BSI KCP Malang Turen 1 melalui program BSI KUR Mikro. Hasil penelitian menunjukkan stabilitas dan pertumbuhan usaha UMKM membaik secara signifikan setelah mendapat pendanaan BSI KUR Mikro dari BSI KCP Malang Turen 1. UMKM mampu kembali beroperasi dan melihat perkembangan positif setelah sebelumnya mengalami penurunan pendapatan bahkan diambang kebangkrutan. Pendanaan ini memberi perusahaan dorongan modal yang sangat dibutuhkan untuk tumbuh dan mempertahankan operasinya.

Dalam konteks pasca pandemi, dukungan dari BSI KUR Mikro juga memungkinkan UMKM untuk beradaptasi dengan perubahan pasar. Dana dari pembiayaan tersebut digunakan oleh sejumlah UMKM untuk mengembangkan produk baru yang sesuai untuk memenuhi permintaan pasar pasca pandemi Covid-19, memperbaiki rantai pasokan, dan berinvestasi pada teknologi baru. Selain itu, UMKM yang mendapat dukungan

dari BSI KCP Malang Turen 1 mampu mempertahankan atau bahkan mengembangkan tenaga kerjanya sehingga bermanfaat bagi perekonomian daerah.

Pengawasan ketat yang dilakukan BSI KCP Malang Turen 1 sangat penting untuk menjamin pembiayaan BSI KUR Mikro disalurkan kepada nasabah yang benar-benar layak dan memiliki potensi pertumbuhan bisnis yang signifikan. Langkah pertama dalam proses ini adalah verifikasi kelayakan komprehensif calon penerima pembiayaan tersebut, yang mencakup pemeriksaan riwayat kredit mereka, kemampuan menjalankan bisnis, komitmen menjalankan bisnis, dan integritas pribadi. Evaluasi karakter pelanggan dilakukan dengan sangat hati-hati, dengan mempertimbangkan sejumlah faktor seperti ketekunan, etika bisnis, dan tanggung jawab keuangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa dana tersebut akan ditangani dengan baik dan digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan. Dengan menggunakan prosedur pemantauan dan verifikasi yang menyeluruh tersebut, BSI KCP Malang Turen 1 bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya hal negatif yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, pembiayaan BSI KUR Mikro telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan UMKM di wilayah Malang Turen 1. Selain membantu UMKM bertahan dari pandemi, inisiatif ini juga mendorong ekspansi berkelanjutan di tengah meningkatnya kesulitan ekonomi. Oleh karena itu, kontribusi BSI KCP Malang Turen 1 terhadap pertumbuhan dan pemulihan perekonomian daerah pasca pandemi Covid-19 melalui produk pembiayaan BSI KUR Mikro menjadi sangat penting.

Perbedaan Signifikan Dalam Pertumbuhan UMKM Yang Menerima Pembiayaan BSI KUR Mikro Dimasa Pandemi Covid-19 dan Pasca Pandemi Covid-19

Pembiayaan BSI KUR Mikro telah menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. Berdasarkan analisis data dan penelitian terdahulu, terdapat perbedaan signifikan dalam pertumbuhan UMKM yang menerima pembiayaan BSI KUR Mikro dibandingkan dengan yang tidak. Penelitian oleh menunjukkan bahwa UMKM yang mendapatkan pembiayaan ini mengalami peningkatan pendapatan rata-rata sebesar 25% dalam satu tahun, sedangkan UMKM yang tidak mendapatkan pembiayaan hanya mengalami peningkatan sebesar 10% (16). Hal ini mengindikasikan bahwa akses terhadap pembiayaan yang memadai merupakan faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan UMKM.

Pembiayaan BSI KUR Mikro yang disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Malang Turen 1 telah menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di wilayah Malang Turen. Namun, dinamika yang terjadi pada UMKM penerima pembiayaan ini menunjukkan perbedaan signifikan antara masa pandemi COVID-19 dan pasca pandemi, baik dari segi tantangan yang dihadapi maupun hasil yang dicapai.

Selama masa pandemi COVID-19, UMKM yang menerima pembiayaan dari BSI KCP Malang Turen 1 menghadapi tekanan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Diharapkan bahwa dana KUR Mikro yang disalurkan dapat membantu UMKM mempertahankan operasional bisnis mereka di tengah ketidakpastian. Namun, banyak dari UMKM ini mengalami kesulitan besar dalam mengelola keuangan mereka. Penurunan drastis dalam permintaan produk dan jasa, gangguan rantai pasok, serta kebijakan pembatasan sosial menyebabkan pendapatan mereka menurun tajam. Akibatnya, sejumlah UMKM mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pembiayaan. Situasi ini tidak hanya menghambat pertumbuhan bisnis, tetapi juga menimbulkan risiko kebangkrutan bagi beberapa pelaku usaha.

Dalam kondisi yang penuh tekanan tersebut, terdapat juga kasus di mana dana KUR Mikro yang diberikan oleh BSI KCP Malang Turen 1, yang seharusnya digunakan untuk pengembangan usaha, dialokasikan untuk keperluan pribadi oleh beberapa penerima pembiayaan. Kesalahan dalam pengelolaan dana ini semakin memperparah kondisi finansial UMKM, karena mereka kehilangan peluang untuk menggunakan modal secara produktif, yang sebenarnya dapat membantu bisnis bertahan di masa sulit. Fenomena ini menunjukkan bahwa tidak semua UMKM mampu memanfaatkan pembiayaan dengan bijak, dan hal ini menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan usaha di masa pandemi.

Namun, memasuki periode pasca pandemi, situasi mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang signifikan. Perekonomian secara bertahap pulih, dan hal ini tercermin dalam peningkatan jumlah pengajuan pembiayaan BSI KUR Mikro di KCP Malang Turen 1. UMKM yang sebelumnya menghadapi tantangan besar kini mulai menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi yang lebih stabil. Dengan pembiayaan yang diterima, banyak UMKM berhasil mengatasi kesulitan yang dihadapi selama pandemi dan bahkan memulai langkah-langkah baru untuk memperluas usaha mereka. Beberapa pelaku usaha memanfaatkan pembiayaan

untuk merestrukturisasi bisnis mereka, sementara yang lain memutuskan untuk beralih ke sektor usaha yang lebih potensial dan relevan dengan perubahan pasar yang terjadi setelah pandemi.

Penting untuk dicatat bahwa pada periode pasca pandemi, pengelolaan dana dan pembayaran angsuran pembiayaan oleh UMKM penerima KUR Mikro dari BSI KCP Malang Turen 1 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Tidak hanya arus kas yang lebih baik, tetapi juga terdapat peningkatan dalam kedisiplinan pembayaran angsuran. Ini menunjukkan adanya pemulihan kepercayaan dan manajemen keuangan yang lebih baik di kalangan pelaku UMKM, yang kini lebih berhati-hati dan strategis dalam menggunakan dana pembiayaan untuk mendukung kelangsungan dan pertumbuhan usaha mereka.

Perbedaan yang signifikan antara masa pandemi dan pasca pandemi dalam pertumbuhan UMKM yang menerima pembiayaan BSI KUR Mikro di KCP Malang Turen 1 menggarisbawahi pentingnya dukungan finansial yang tepat sasaran dan pengelolaan yang bijak. Selama pandemi, banyak UMKM menghadapi tantangan berat, termasuk kesulitan dalam pembayaran angsuran dan kesalahan dalam penggunaan dana, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan mereka dan, dalam beberapa kasus, menyebabkan kebangkrutan. Sebaliknya, pada periode pasca pandemi, UMKM menunjukkan pemulihan yang lebih kuat dengan memanfaatkan pembiayaan secara lebih efektif, yang tidak hanya membantu mereka bangkit dari keterpurukan tetapi juga mendorong mereka untuk berkembang di tengah kondisi ekonomi yang mulai stabil.

Pembiayaan BSI KUR Mikro dari Bank Syariah Indonesia KCP Malang Turen 1, oleh karena itu, tetap menjadi alat penting dalam mendukung UMKM, baik dalam menghadapi masa krisis maupun dalam memanfaatkan peluang di masa pemulihan. Dukungan finansial ini, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di wilayah Malang Turen.

Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Produk Pembiayaan BSI KUR Mikro dalam Mendukung Pertumbuhan Umkm

Keberhasilan program pembiayaan BSI KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Malang Turen 1 dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berhubungan. Memahami elemen-elemen ini sangat penting untuk memastikan bahwa program pembiayaan dapat mencapai hasil yang diharapkan secara efektif dan berkelanjutan.

1) Analisis 5C dalam Pembiayaan BSI KUR Mikro:

Untuk memastikan bahwa pembiayaan BSI KUR Mikro di BSI KCP Malang Turen 1 diberikan secara tepat sasaran dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dilakukan analisis berdasarkan pendekatan 5C. Pendekatan ini mencakup lima aspek utama yang membantu dalam menilai kelayakan dan potensi penerima pembiayaan, sehingga dapat meminimalkan risiko serta meningkatkan efektivitas penggunaan dana. Aspek-aspek tersebut adalah:

- a) **Character (Karakter):** Penilaian terhadap karakter nasabah di BSI KCP Malang Turen 1 melibatkan aspek integritas, komitmen, dan sejarah usaha mereka. BSI KCP Malang Turen 1 melakukan evaluasi mendalam untuk memastikan bahwa calon penerima pembiayaan memiliki niat dan dedikasi yang kuat dalam mengembangkan usahanya dengan cara yang berkelanjutan. Karakter yang baik memberikan jaminan awal bahwa dana akan digunakan sesuai dengan tujuan dan tidak disalahgunakan.
- b) **Capacity (Kapasitas):** Kapasitas mencakup kemampuan nasabah di BSI KCP Malang Turen 1 untuk mengelola usaha dan memenuhi kewajiban keuangan mereka. BSI KCP Malang Turen 1 menilai kapasitas ini dengan mempertimbangkan pengalaman, keterampilan manajerial, dan kinerja usaha sebelumnya. Kapasitas yang memadai menunjukkan bahwa nasabah dapat memanfaatkan pembiayaan secara efektif untuk mengembangkan usahanya dan memenuhi kewajiban pembayaran.
- c) **Capital (Modal):** Penilaian terhadap modal nasabah mencakup kekuatan finansial mereka sebelum menerima pembiayaan. BSI KCP Malang Turen 1 menilai modal yang dimiliki untuk memastikan bahwa nasabah memiliki basis keuangan yang solid dan mampu menanggung risiko usaha. Modal yang cukup menunjukkan bahwa nasabah memiliki dukungan finansial yang memadai untuk menutupi biaya operasional dan mendukung pertumbuhan usaha.
- d) **Collateral (Agunan):** Collateral atau agunan adalah jaminan tambahan yang disediakan oleh nasabah untuk mengamankan pembiayaan. Meskipun BSI KCP Malang Turen 1 sering kali tidak

memerlukan agunan yang besar, penilaian terhadap aset yang dimiliki tetap dilakukan untuk mengurangi risiko kredit. Collateral yang memadai memberikan kepastian tambahan bagi BSI KCP Malang Turen 1 bahwa pembiayaan dapat dikembalikan meskipun ada risiko gagal bayar.

- e) **Conditions (Kondisi):** Kondisi mencakup faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha, seperti kondisi ekonomi, industri, dan pasar. BSI KCP Malang Turen 1 melakukan analisis terhadap kondisi ini untuk menilai risiko eksternal yang mungkin dihadapi oleh nasabah. Pemahaman tentang kondisi ini memungkinkan BSI KCP Malang Turen 1 untuk memberikan pembiayaan yang sesuai dengan situasi pasar dan kebutuhan nasabah.

2) Kelayakan Usaha dan Penilaian Risiko:

Salah satu faktor kunci adalah kelayakan usaha dan penilaian risiko yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Malang Turen 1 merupakan elemen penting dalam menentukan efektivitas pembiayaan. Evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan usaha melibatkan analisis rencana bisnis, kemampuan manajerial, dan kondisi keuangan pelaku UMKM. Menurut penelitian oleh (17), penilaian risiko yang cermat dan selektif dapat meminimalkan risiko kredit macet dan meningkatkan keberhasilan implementasi. Proses penilaian yang transparan dan berbasis data di BSI KCP Malang Turen 1 membantu memastikan bahwa pembiayaan diberikan kepada UMKM yang memiliki potensi pertumbuhan yang baik.

3) Pengawasan untuk Memastikan Akad Murabahah dalam Pembiayaan BSI KUR Mikro:

Pengawasan untuk menjamin bahwa akad yang digunakan adalah akad Murabahah sangat penting dalam pendanaan UMKM di BSI KCP Malang Turen 1. Salah satu akad dalam perbankan syariah, yang dikenal dengan murabahah, mengamanatkan bank membeli produk terlebih dahulu kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah ditentukan. BSI memantau secara ketat prosedur ini untuk menjamin bahwa pendanaan tersebut memang sesuai dengan prinsip syariah. Selain memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan hukum syariah, pengawasan juga mencakup kepastian bahwa komoditas yang diperoleh hanya untuk keperluan bisnis. Pengawasan yang efektif dapat mengurangi kemungkinan kesalahan pengelolaan keuangan dan mencapai tujuan utama pendanaan, yaitu membantu pengembangan perusahaan dengan lebih baik.

Prosedur pengajuan dan persetujuan pembiayaan BSI KUR Mikro

Prosedur pengajuan dan persetujuan pembiayaan BSI KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Turen 1 dimulai dengan tahap verifikasi awal yang sangat penting. Pada tahap ini, Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemohon harus terdaftar untuk memastikan kelayakan kredit. Pemeriksaan dilakukan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memantau informasi kredit. Selain itu, dilakukan juga BI Checking untuk melihat riwayat kredit calon nasabah, Daftar Hitam Nasional (DHN) untuk memastikan bahwa pemohon tidak terdaftar dalam daftar hitam terkait kredit bermasalah, serta Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) untuk mengonfirmasi kelayakan calon penerima program kredit dari pemerintah. Proses verifikasi yang komprehensif ini sangat penting untuk mengurangi risiko kredit macet dan memastikan pembiayaan disalurkan kepada nasabah yang benar-benar layak.”

Setelah verifikasi awal selesai, Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Turen 1 melanjutkan dengan kunjungan pertama ke lokasi usaha. Kunjungan ini sangat penting karena memberikan bank kesempatan untuk menilai kondisi usaha secara langsung. Selama kunjungan ini, berbagai aspek usaha dievaluasi, termasuk hutang piutang nasabah, stok barang yang tersedia, dan perputaran barang dagangan. Hutang piutang nasabah menjadi indikator penting dalam menilai kesehatan keuangan usaha, sedangkan stok dan perputaran barang mencerminkan efektivitas manajemen inventori. Di samping itu, karakter nasabah juga menjadi fokus utama selama kunjungan ini. Karakter nasabah dinilai berdasarkan cara mereka menjawab pertanyaan yang diajukan oleh petugas bank, yang dapat memberikan wawasan tentang integritas dan komitmen mereka terhadap usaha yang dijalankan. Penilaian karakter nasabah adalah langkah kritis dalam proses ini, karena sangat mempengaruhi keputusan akhir bank terkait persetujuan pembiayaan.

Setelah kunjungan pertama selesai, bank kemudian melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan. Analisis ini mencakup evaluasi terhadap kesehatan finansial usaha, kelayakan usaha untuk menerima pembiayaan, serta risiko-risiko yang mungkin timbul. Pada tahap ini, bank juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti potensi pertumbuhan usaha dan kemampuan nasabah dalam mengelola hutang yang ada. Proses ini dilakukan dengan sangat hati-hati untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar tepat dan mendukung keberhasilan usaha nasabah di masa depan. Dengan analisis

yang mendalam ini, Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Turen 1 bertujuan untuk meminimalisir risiko gagal bayar dan memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perkembangan usaha nasabah.

Tahap akhir dalam prosedur ini adalah keputusan mengenai persetujuan pembiayaan dan pelaksanaan akad. Jika analisis menunjukkan bahwa usaha tersebut layak menerima pembiayaan, nasabah kemudian diundang ke bank untuk menandatangani akad pembiayaan. Akad ini merupakan perjanjian resmi antara bank dan nasabah, yang menandai pencairan dana pembiayaan. Dalam proses ini, Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Turen 1 bank menekankan pentingnya transparansi dan tanggung jawab, baik dari pihak bank maupun nasabah. Dengan menyelesaikan tahap ini, BSI menunjukkan komitmennya untuk menyalurkan pembiayaan secara tepat dan bertanggung jawab kepada UMKM yang memenuhi syarat, yang pada akhirnya diharapkan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih luas.

KESIMPULAN

Program pembiayaan BSI KUR Mikro memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM, baik selama pandemi COVID-19 maupun setelahnya. Selama krisis, program ini berperan sebagai sumber modal krusial, membantu UMKM mengatasi penurunan pendapatan dan tantangan operasional dengan memberikan stabilitas yang sangat dibutuhkan. Dengan suntikan modal yang signifikan, UMKM dapat bertahan dan terus beroperasi meskipun dalam situasi yang sulit.

Setelah pandemi, dampak positif dari BSI KUR Mikro dalam mendukung pertumbuhan UMKM semakin jelas terlihat. Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Malang Turen 1 memungkinkan banyak UMKM yang awalnya mengalami kesulitan dalam pemulihan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar, berinvestasi dalam pengembangan usaha, dan mengelola bisnis mereka dengan lebih efektif. Hal ini mencerminkan pemulihan yang signifikan dan pertumbuhan yang positif dalam sektor UMKM setelah pandemi.

Ada perbedaan yang signifikan antara pertumbuhan UMKM yang menerima pembiayaan BSI KUR Mikro selama pandemi dan setelahnya. Pada masa pandemi, banyak UMKM mengalami kesulitan dalam pengelolaan dana dan kewajiban pembayaran, yang menyebabkan penurunan pendapatan dan risiko kebangkrutan. Sebaliknya, setelah pandemi, UMKM menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan, disiplin dalam pembayaran angsuran, dan adaptasi terhadap kondisi ekonomi yang lebih stabil, yang mengarah pada perkembangan usaha yang lebih baik.

Keberhasilan program ini dipengaruhi oleh berbagai faktor penting seperti analisis 5C, penilaian kelayakan usaha, dan pengawasan akad Murabahah. Proses pengajuan dan persetujuan pembiayaan, yang mencakup verifikasi awal, kunjungan lapangan, dan analisis mendalam, memastikan bahwa dana disalurkan kepada UMKM yang benar-benar memenuhi syarat dan memiliki potensi untuk berkembang. Pengawasan ketat terhadap akad Murabahah juga menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah dan penggunaan dana yang tepat. Dengan langkah-langkah ini, BSI KCP Malang Turen 1 dapat secara berkelanjutan dan inklusif mendukung pertumbuhan UMKM di wilayah tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

1. Muttaqin F, Idhom M, Akbar FA, Swari MHP, Putri ED. Measurement of the IT Helpdesk Capability Level Using the COBIT 5 Framework. *J Phys Conf Ser.* 2020;1569(2).
2. Muttaqin HM, Kosim AM, Devi A. Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dimasa Pandemi Covid-19. *El-Mal J Kaji Ekon Bisnis Islam.* 2020;3(1):110–9.
3. Fuan Ertiyant W, Nur Latifah F. Peran Bank Syariah Terhadap Pembiayaan Umkm Di Masa Pandemi Covid-19. *J Tabarru' Islam Bank Financ.* 2022;5(1):199–206.
4. BELLA NS. Analisis Penyusunan Strategi Pengembangan Pembiayaan Sektor Pertanian Dengan Metode Berlian Porter Untuk Mewujudkan 2022;
5. Octasia M&. File_10-Bab-II-Landasan-Teori. Vol. 20, Abdulloh. 2018. p. 2–10.
6. Nur Budi Utama A, Irma Suryani A. Peranan Perbankan Dalam Implementasi dan Informasi Pemberian Kredit Usaha Rakyat The Role of Banking in Implementation and Information Provision of People's Business Credit. *J Smart Sos Ekon dan Kerakyatan.* 2023;1(1):24–35.
7. HERRERA VILLANUEVA EY. No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連

- 指標に関する共分散構造分析Title. 2020;2017(1):1-9.
8. Fitriyah SL, Rahman T. Peranan Dan Strategi Pemasaran Kur Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Umkm Pada Bsi Kc Bojonegoro. *J Tabarru' Islam Bank Financ.* 2023;6(2):636-46.
 9. Alimudin A, Falani AZ, Mudjanarko SW, Limantara AD. Analisis Pengaruh Penerapan Perspektif Balanced Scorecard Terhadap Peningkatan Kinerja UMKM. *Ekonika J Ekon Univ kadiri.* 2019;4(1):1.
 10. Pamungkas HA, Hidayatulloh A. Faktor penentu perkembangan umkm gerabah kasongan bantul yogyakarta Determinants of the development of the kasongan bantul earthenware vessel. *Inovasi.* 2019;15(1):65-71.
 11. Arliman S L. Perlindungan Hukum Umkm Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *J Rechts Vinding Media Pembn Huk Nas.* 2017;6(3):387.
 12. Tuti Anggraini, Ika Adeyani. Analisis Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Pensiun Pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat. *J Econ Curr Study.* 2021;3(2):47-66.
 13. Annisaa A, Ismail N, Hidayat IN. Sejarah Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. *Ijtihad J Huk dan Ekon Islam.* 2019;13(2):248.
 14. Noviyanti R. Bank Syariah: Antara Konsepsi dan Implementasi. *Iqtishodia J Ekon Syariah.* 2018;3(1):21-38.
 15. Hasan I. Preferensi Masyarakat Terhadap Bank Syariah Di Kota Malang. *Iqtishoduna.* 2011;4(3):1-19.
 16. Ati DM, Nopitasari F, Pepi P, Yunus F, Setiawan A. Pembiayaan Kur Bsi Untuk Perkembangan Umkm Di Desa Embong Ijuk Kabupaten Kepahiyang. *J Ilm Akuntansi, Manaj dan Ekon Islam.* 2022;4(2):383-93.
 17. Herdinata C, Pranatasari FD. LITERASI KEUANGAN BERBASIS FINTECH Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *CV Budi Utama.* 2018;3(1):10-27.